

**SOSIALISASI MEKANISME EVALUASI DAN MONITORING PENYUSUNAN
DOKUMEN RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
(DOKUMEN RPKD) KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT, PROVINSI MALUKU**

Antasari Bandjar¹, Rosdawiyah²

Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas

Pattimura^{1,2}

e-mail: rosdawiyah18@gmail.com

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya angka kemiskinan di Kabupaten Seram Bagian Barat yang menuntut peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam merancang kebijakan penanggulangan kemiskinan yang terukur dan berkelanjutan. Tujuan utama kegiatan adalah memperkuat kemampuan aparatur serta pemangku kepentingan daerah dalam memahami dan menerapkan mekanisme monitoring dan evaluasi pada penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD). Kegiatan dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif yang meliputi sosialisasi, pelatihan, diskusi, demonstrasi, dan pemanfaatan media sosial untuk memperluas jangkauan informasi. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman teknis peserta terhadap tahapan monev, terbentuknya rancangan awal sistem monev RPKD, serta terbangunnya koordinasi lintas sektor dalam mendukung kebijakan berbasis data. Selain itu, kegiatan ini berhasil menumbuhkan kesadaran pentingnya evaluasi berbasis bukti sebagai dasar perbaikan strategi penanggulangan kemiskinan daerah. Kegiatan ini memberikan kontribusi nyata bagi pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola penanggulangan kemiskinan yang lebih adaptif, transparan, dan berorientasi pada hasil, sekaligus menjadi langkah awal menuju efektivitas kebijakan pengurangan kemiskinan secara berkelanjutan di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Kata kunci: *RPKD, Monitoring dan Evaluasi, Penanggulangan Kemiskinan, Seram Bagian Barat, Pengabdian Masyarakat.*

ABSTRACT

This community service activity was motivated by the increasing poverty rate in West Seram Regency, which underscores the need to strengthen the local government's capacity to design measurable and sustainable poverty reduction policies. The main objective of the program was to enhance the competencies of local government officials and stakeholders in understanding and implementing monitoring and evaluation mechanisms in developing the Regional Poverty Reduction Plan Document (RPKD). The activity was carried out through a participatory approach involving socialization, training, discussions, demonstrations, and the use of social media to broaden information dissemination. The results showed improved technical understanding among participants regarding monev stages, the formulation of an initial draft of the RPKD monev system, and strengthened cross-sectoral coordination in supporting evidence-based policymaking. Furthermore, this activity fostered greater awareness of the importance of evidence-based evaluation as a foundation for refining regional poverty reduction strategies. Overall, the program contributes significantly to enhancing local governance capacity in poverty alleviation by promoting a more adaptive, transparent, and results-oriented management framework, serving as an initial step toward more effective and sustainable poverty reduction policies in West Seram Regency.

Keywords: *RPKD, Monitoring and Evaluation, Poverty Reduction, West Seram Regency, Community Service.*

Copyright (c) 2025 COMMUNITY : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

PENDAHULUAN

Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) merupakan wilayah kepulauan di Provinsi Maluku yang memiliki potensi sumber daya alam melimpah, mencakup sektor perikanan, pariwisata pesisir, dan pertanian sagu. Potensi ini seharusnya dapat menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, kondisi ideal tersebut belum tercapai secara optimal karena sebagian besar masyarakat masih hidup di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan data BPS SBB (2024), persentase penduduk miskin mencapai 22,31%, menjadikannya daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi kedua di Provinsi Maluku setelah Kabupaten Maluku Tengah. Angka ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan masih menghadapi tantangan kompleks, meskipun terdapat penurunan kecil dari tahun-tahun sebelumnya.

Fenomena tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan yang cukup tajam antara potensi sumber daya alam yang besar dan realitas sosial ekonomi masyarakat di lapangan. Idealnya, kekayaan sumber daya alam dapat menjadi modal pembangunan yang mampu menggerakkan sektor produktif dan menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Namun kenyataannya, berbagai faktor struktural seperti rendahnya kapasitas aparatur daerah, lemahnya sistem data kemiskinan, serta koordinasi antarinstansi yang belum optimal masih menjadi kendala utama (Setiawan et al., 2022). Akibatnya, kebijakan penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah belum sepenuhnya berbasis data dan sering kali tidak memiliki sistem evaluasi yang terukur, sehingga dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat menjadi terbatas. Kajian terbaru menunjukkan bahwa pemanfaatan dana desa (*village funds*) di Indonesia masih belum optimal untuk pengurangan kemiskinan karena tata kelola dan kapasitas lokal yang belum memadai (Anam, 2023).

Sejumlah penelitian menegaskan bahwa kapasitas kelembagaan pemerintah daerah memiliki pengaruh langsung terhadap efektivitas pelayanan publik dan keberhasilan pembangunan daerah (Setiawan et al., 2022). Di sisi lain, dinamika kemiskinan di Indonesia juga sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti krisis ekonomi dan pandemi, yang menegaskan pentingnya sistem pemantauan dan evaluasi kebijakan yang tangguh (Suryahadi et al., 2020). Dalam konteks global, *Sustainable Development Goals* (SDGs) menempatkan “Tanpa Kemiskinan” sebagai tujuan pertama yang menuntut adanya sistem perencanaan pembangunan yang inklusif, adaptif, dan berbasis bukti (World Bank, 2020). Oleh karena itu, memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam melakukan monitoring and evaluasi (Monev) merupakan langkah strategis untuk mempercepat pencapaian target pengurangan kemiskinan di tingkat lokal sekaligus mendorong keberlanjutan pembangunan berbasis data (Sugiyarto et al., 2025).

Meski demikian, berbagai studi menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah daerah masih menghadapi keterbatasan dalam penerapan sistem monev yang komprehensif. Hambatan yang umum terjadi antara lain kurangnya kemampuan analisis data mikro, rendahnya literasi aparatur terhadap pengukuran indikator kinerja, serta belum tersedianya panduan monev yang konsisten di tingkat kabupaten (Surtiari et al., 2024). Selain itu, belum adanya mekanisme koordinasi lintas sektor yang efektif sering kali mengakibatkan kebijakan penanggulangan kemiskinan berjalan secara parsial dan tidak berkelanjutan. Situasi ini menuntut adanya intervensi berbasis peningkatan kapasitas (*capacity building*) yang tidak hanya menekankan aspek administratif, tetapi juga mendorong kemampuan analitik dan penggunaan data dalam pengambilan keputusan pembangunan daerah.

Dalam konteks tersebut, penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025–2029 menjadi langkah penting Copyright (c) 2025 COMMUNITY : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

untuk memperkuat tata kelola kebijakan daerah. Dokumen ini berperan sebagai panduan strategis bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi program penanggulangan kemiskinan secara sistematis. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan bertujuan mendukung penyusunan dokumen tersebut melalui pelatihan, sosialisasi, dan diskusi partisipatif yang menitikberatkan pada pemahaman mekanisme monev berbasis bukti. Dengan pendekatan ini, kegiatan tidak hanya menghasilkan peningkatan kompetensi aparatur, tetapi juga membantu membangun kerangka sistem evaluasi yang terintegrasi di tingkat kabupaten.

Nilai kebaruan dari kegiatan ini terletak pada penerapan pendekatan integratif antara *capacity building* teknis dan pengembangan sistem monev berbasis data lokal. Pendekatan ini mengombinasikan pelatihan teknis, simulasi penginputan indikator kemiskinan, dan kolaborasi lintas sektor dalam satu model pembelajaran partisipatif. Inovasi tersebut memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih transparan, adaptif, dan akuntabel. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi model awal bagi daerah lain dalam mengembangkan RPKD yang lebih efektif dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya nasional untuk menurunkan angka kemiskinan secara sistematis dan terukur.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan selama tiga hari, yaitu pada tanggal 25–27 Mei 2025, bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, Kota Piru. Peserta berjumlah 35 orang yang terdiri atas aparatur dari Bappeda, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TPKD), serta perwakilan dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Kegiatan ini menggunakan *participatory training approach* yang menekankan partisipasi aktif peserta dalam memahami dan menerapkan prinsip monitoring and evaluasi (Monev) pada penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD). Pendekatan ini dipilih karena dinilai efektif untuk meningkatkan kapasitas teknis aparatur daerah sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam proses perencanaan kebijakan berbasis data.

Tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi sosialisasi, pelatihan teknis, diskusi kelompok, dan evaluasi. Sosialisasi awal difokuskan pada pemahaman konsep RPKD, prinsip monev, dan regulasi nasional yang relevan dengan acuan Bappenas (2022) serta TNP2K (2022). Pelatihan teknis dilaksanakan melalui simulasi penyusunan indikator kinerja dan analisis data kemiskinan menggunakan video tutorial serta lembar kerja indikator kinerja. Selanjutnya, peserta dibagi dalam kelompok kecil untuk menyusun rancangan mekanisme monev menggunakan metode *focus group discussion* (FGD) dan demonstrasi sistem pelaporan berbasis contoh data daerah. Tahapan ini memperkuat kemampuan peserta dalam menyusun logframe dan menghubungkan antara indikator, capaian, serta keluaran program secara sistematis.

Evaluasi kegiatan dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu formatif dan sumatif. Evaluasi formatif dilakukan dengan observasi langsung selama pelatihan untuk menilai tingkat partisipasi dan keterlibatan peserta, sedangkan evaluasi sumatif dilaksanakan melalui penyebaran kuesioner *post-test* guna mengukur peningkatan pemahaman teknis terhadap konsep dan penerapan monev. Selain itu, media sosial dimanfaatkan sebagai sarana diseminasi hasil pelatihan agar informasi dan praktik baik dapat tersebar lebih luas kepada publik. Rangkaian metode ini dirancang tidak hanya sebagai proses transfer pengetahuan, tetapi juga untuk menumbuhkan kolaborasi dan pembelajaran kolektif antara akademisi dan aparatur daerah dalam memperkuat tata kelola kebijakan penanggulangan kemiskinan yang adaptif, transparan, dan berbasis bukti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kegiatan pengabdian masyarakat yang berfokus pada pelatihan monitoring and evaluasi (Monev) penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) di Kabupaten Seram Bagian Barat terlaksana dengan baik dan memperoleh respons positif dari peserta. Sebanyak 35 aparatur daerah yang berasal dari Bappeda, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TPKD), serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait mengikuti kegiatan secara aktif selama tiga hari. Penerapan *participatory training approach* terbukti efektif mendorong keterlibatan peserta dalam memahami mekanisme monev yang menjadi acuan penyusunan RPKD. Selain meningkatkan pemahaman teknis, kegiatan ini juga memperkuat kerja sama lintas sektor dan menumbuhkan semangat kolaborasi dalam perencanaan kebijakan daerah berbasis data.

Untuk menilai efektivitas pelatihan, dilakukan pengukuran pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan melalui *pre-test* dan *post-test*. Data hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada seluruh aspek yang diukur, meliputi pemahaman konsep dasar monev, kemampuan menyusun indikator kinerja, keterampilan analisis data kemiskinan, dan kemampuan penyusunan laporan monev. Peningkatan tersebut disajikan dalam Tabel 1 berikut.

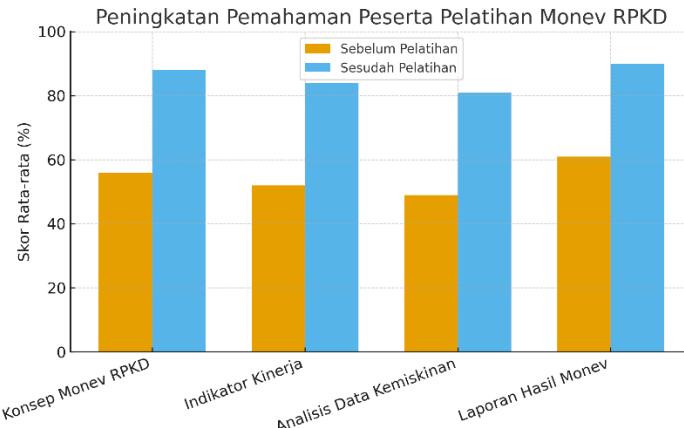
Tabel 1. Peningkatan pemahaman peserta

No.	Komponen Capaian	Sebelum Pelatihan (Skor Rata-rata, %)	Sesudah Pelatihan (Skor Rata-rata, %)	Peningkatan %
1	Pemahaman konsep dasar monev RPKD	56	88	32
2	Kemampuan menyusun indikator kinerja	52	84	32
3	Kemampuan analisis data kemiskinan	49	81	32
4	Pemahaman penyusunan laporan hasil monev	61	90	29
Rata-rata peningkatan pemahaman peserta		54,5	85,75	31,25

Sumber : Hasil kusioner pelatihan, Mei 2025

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1, seluruh komponen mengalami peningkatan pemahaman rata-rata sebesar 31,25 %. Peningkatan tertinggi terdapat pada kemampuan menyusun indikator kinerja dan pemahaman konsep dasar monev, yang menunjukkan bahwa pelatihan berhasil memperkuat kemampuan teknis peserta dalam menghubungkan indikator capaian dengan hasil program. Hasil ini menegaskan bahwa metode pelatihan berbasis simulasi dan diskusi interaktif efektif dalam meningkatkan keterampilan analitis aparatur daerah terhadap perencanaan dan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Untuk memperjelas hasil secara visual, Gambar 1 menampilkan grafik batang yang memperlihatkan perbandingan tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah pelatihan. Grafik ini memperkuat data kuantitatif dalam tabel sebelumnya dengan menunjukkan tren peningkatan seragam pada setiap aspek capaian. Sementara itu, Gambar 2 mendokumentasikan kegiatan sosialisasi yang menjadi tahap awal pelatihan. Dokumentasi tersebut memperlihatkan antusiasme peserta dan suasana pelatihan yang partisipatif, sehingga menjadi bukti empiris keberhasilan pendekatan *participatory training* yang digunakan.



Gambar 1. Grafik batang peningkatan pemahaman peserta Pelatihan Monev RPKD

Setelah penerapan pelatihan monitoring dan evaluasi (monev), grafik pada Gambar 1 memperlihatkan adanya peningkatan konsisten pada seluruh aspek kompetensi peserta. Setiap indikator menunjukkan tren kenaikan yang relatif merata antara 29–32 persen, menandakan bahwa metode pelatihan partisipatif efektif dalam memperkuat kemampuan analisis dan evaluasi aparatur daerah. Peningkatan ini tidak hanya mencerminkan pemahaman konseptual terhadap mekanisme monev, tetapi juga menunjukkan kemampuan peserta dalam menerapkan konsep tersebut pada konteks kerja riil penyusunan RPKD. Dengan demikian, hasil visual ini menjadi bukti empiris bahwa pelatihan berbasis praktik mampu mendorong perubahan perilaku belajar yang lebih adaptif dan kolaboratif di lingkungan birokrasi daerah.



Gambar 2. Kegiatan Sosialisasi Penguatan Pemahaman Mekanisme Monev RPKD

Secara keseluruhan, hasil kegiatan ini menunjukkan keberhasilan program pengabdian dalam meningkatkan kapasitas teknis aparatur daerah melalui pelatihan yang terstruktur dan berbasis kebutuhan lapangan. Selain menghasilkan peningkatan kompetensi individu, kegiatan ini juga berdampak pada penguatan sistem kelembagaan daerah dalam merancang mekanisme monev RPKD yang lebih adaptif, transparan, dan terukur. Dengan demikian, kegiatan ini memberikan kontribusi nyata dalam mendukung tata kelola kebijakan penanggulangan kemiskinan yang berorientasi pada hasil serta sejalan dengan prinsip *good governance* dan pembangunan berkelanjutan.

Pembahasan

Kegiatan pengabdian masyarakat berupa sosialisasi dan pelatihan monitoring dan evaluasi (monev) penyusunan RPKD menunjukkan peningkatan kapasitas peserta yang signifikan. Peningkatan tersebut terlihat pada pemahaman peserta terhadap konsep dasar

monev, kemampuan analisis data kemiskinan, serta keterampilan dalam menyusun indikator kinerja. Hal ini menandakan bahwa kegiatan tidak hanya berhasil mentransfer pengetahuan teknis, tetapi juga memperkuat kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi perencanaan dan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian, hasil pelatihan memperlihatkan proses *capacity enhancement* yang mencakup dimensi individu dan organisasi secara bersamaan.

Dalam perspektif *capacity building*, peningkatan rata-rata pemahaman peserta sebesar 31% setelah pelatihan mencerminkan penguatan kapasitas analitik aparatur daerah. Hal ini menunjukkan kemampuan mereka untuk memahami konsep monev dan mengolah data secara sistematis, yang merupakan bagian dari *analytical capacity*. Peningkatan ini tidak hanya terjadi pada tingkat individu, tetapi juga menjadi indikator terbentuknya kemampuan reflektif dan adaptif sebagai inti teori *capacity building*. Pandangan ini sejalan dengan Setiawan (2022), yang menegaskan bahwa peningkatan kapasitas analitik memungkinkan pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan berbasis data dan bukti (*evidence-based policy*), sehingga memperkuat efektivitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja. Selain itu, tersusunnya rancangan mekanisme monev dan video tutorial hasil pelatihan menunjukkan perkembangan kapasitas operasional kelembagaan, yaitu kemampuan organisasi dalam mengembangkan sistem dan prosedur kerja yang berorientasi pada pembelajaran kelembagaan (*institutional learning*). Sejalan dengan hal ini, Landiyanto (2015) menekankan bahwa penguatan kelembagaan melalui dokumen, modul, dan sistem pendukung merupakan elemen penting bagi keberlanjutan implementasi monev di era desentralisasi.

Lebih lanjut, terjalannya koordinasi lintas SKPD dan dukungan aktif Bappeda serta TPKD mencerminkan peningkatan kapasitas koordinatif atau politik (*political capacity*). Dalam teori *capacity building*, hal ini terkait dengan kemampuan aktor birokrasi untuk berkolaborasi lintas sektor serta membangun jejaring kerja yang efektif. Penguatan koordinasi tersebut juga sejalan dengan prinsip *good governance*, yang menekankan pentingnya akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas, dan sinergi antaraktor publik (World Bank, 2020). Pelatihan monev RPKD ini telah mendorong peserta untuk menerapkan materi pelatihan secara langsung, termasuk penyusunan indikator kinerja, evaluasi berbasis data, serta publikasi hasil secara terbuka dan terukur. Temuan ini juga mendukung penelitian Ojok dan Basheka (2016), yang menunjukkan bahwa penerapan sistem monev yang efektif merupakan instrumen utama dalam memperkuat *good governance*. Selain itu, Aldehaim et al. (2024) menegaskan bahwa pelatihan yang bersifat partisipatif dan praktis berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kompetensi berkelanjutan di sektor publik. Dengan demikian, kegiatan ini berhasil mengintegrasikan pembelajaran praktis dan reflektif yang berorientasi pada penguatan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan berbasis bukti.

Kegiatan pengabdian ini juga memperlihatkan dimensi *organizational learning* dalam konteks pemerintahan daerah. Melalui pelatihan dan diskusi partisipatif, peserta terdorong untuk berbagi pengalaman, merumuskan solusi bersama, dan merefleksikan praktik kebijakan yang telah dilaksanakan. Dalam teori *organizational learning*, proses pembelajaran institusional tidak terjadi secara otomatis pada tingkat organisasi, melainkan berawal dari individu yang mentransfer hasil pembelajaran pribadi ke dalam konteks kerja kolektif (Ortenblad, 2019). Oleh karena itu, peningkatan kapasitas individu berfungsi sebagai pintu masuk bagi terbentuknya budaya belajar di organisasi publik. Seiring aparatur mampu memahami dan mengimplementasikan konsep kebijakan, monev, dan perbaikan kinerja secara mendalam, mereka tidak hanya meningkatkan kompetensi personal tetapi juga berkontribusi terhadap inovasi kelembagaan. Pengetahuan baru yang muncul dari interaksi antaraparat mendorong perubahan dalam cara lembaga merancang, mengambil keputusan, dan

menevaluasi hasil pembangunan. Hal ini memperkuat budaya organisasi yang terbuka terhadap pembaruan, di mana kesalahan dipandang sebagai peluang belajar, bukan sekadar kegagalan administratif (Kesavan, 2021). Sejalan dengan pandangan Piening dan Salge (2015), lembaga publik yang berfungsi sebagai organisasi belajar akan lebih mampu beradaptasi terhadap perubahan kebijakan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan.

Selain itu, beberapa penelitian terdahulu juga menguatkan relevansi temuan kegiatan ini. Hapsari et al. (2023) di Provinsi Jawa Barat menegaskan pentingnya optimalisasi monev untuk meningkatkan kualitas perencanaan daerah, sedangkan Qisthi dan Pandoyo (2024) menemukan bahwa efektivitas monev sangat bergantung pada kapasitas teknis aparatur dan ketersediaan data yang akurat. Temuan pengabdian ini memperkuat hasil kedua penelitian tersebut dengan bukti empiris bahwa pelatihan partisipatif berdampak langsung terhadap penguatan sistem dan instrumen monev kelembagaan. Selanjutnya, temuan ini juga memperluas penelitian Prasetyo et al. (2024) yang menyoroti digitalisasi sistem monev di Kementerian Dalam Negeri, dengan menunjukkan bahwa pendekatan pelatihan berbasis praktik dapat memperkuat sistem monev di tingkat daerah secara berkelanjutan. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya mereplikasi penelitian terdahulu, tetapi juga memperluas pemahaman empiris tentang bagaimana monev dapat berfungsi sebagai instrumen *capacity building* dan *institutional learning* di level pemerintahan daerah.

Hasil kegiatan ini juga selaras dengan kebijakan desentralisasi di Indonesia, di mana pemerintah daerah diharapkan lebih mandiri dalam merencanakan dan melaksanakan program penanggulangan kemiskinan. Penelitian Fajria et al. (2025) menunjukkan bahwa keberhasilan desentralisasi sangat dipengaruhi oleh kapasitas lembaga daerah dalam melaksanakan evaluasi berbasis data dan penguatan tata kelola lokal. Oleh karena itu, penguatan sistem monev seperti yang dilakukan di Kabupaten Seram Bagian Barat dapat menjadi contoh praktik desentralisasi yang efektif karena mampu menyediakan dasar empiris dalam penyusunan kebijakan kontekstual. Secara konseptual, keterkaitan antara *capacity building* dan *good governance* tampak jelas dalam hasil kegiatan ini. Peningkatan kemampuan individu dan kelembagaan menghasilkan tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel, transparan, dan berorientasi hasil. Dengan demikian, pelatihan monev RPKD tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis aparatur, tetapi juga memperkuat fondasi kebijakan publik yang berbasis pembelajaran dan bukti.

Pada akhirnya, seluruh proses ini diarahkan untuk memastikan bahwa implementasi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan berjalan sesuai target serta memberikan dampak nyata bagi penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Seram Bagian Barat. Proses koreksi dan penyesuaian strategi yang dilakukan berdasarkan hasil monev menunjukkan adanya praktik pembelajaran kelembagaan yang berkelanjutan. Pendekatan seperti ini penting untuk menjaga efektivitas dan efisiensi program, sekaligus mendorong transformasi birokrasi menuju tata kelola pembangunan yang reflektif dan adaptif. Selain itu, mekanisme monev yang sistematis berperan penting dalam memperkuat proses pengambilan keputusan berbasis data, memastikan keberlanjutan hasil pelatihan, dan menciptakan budaya evaluasi yang melekat dalam sistem pemerintahan daerah. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kapasitas teknis aparatur, tetapi juga pada pembentukan tata kelola daerah yang berorientasi pada pembelajaran berkelanjutan dan pembangunan inklusif.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat kapasitas kelembagaan pemerintah daerah melalui peningkatan kemampuan aparatur dalam

memahami dan menerapkan mekanisme monitoring and evaluasi (Monev) penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD). Melalui pendekatan sosialisasi, pelatihan, dan diskusi partisipatif, para peserta tidak hanya memperoleh keterampilan teknis dalam menyusun indikator kinerja dan mengelola data kemiskinan, tetapi juga mengembangkan kesadaran pentingnya penggunaan data sebagai dasar pengambilan keputusan kebijakan publik. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penerapan *participatory training approach* mampu meningkatkan kompetensi individu sekaligus memperkuat dimensi kelembagaan, sehingga mendukung prinsip *good governance* di tingkat daerah. Dengan demikian, kegiatan ini berhasil mewujudkan sinergi antara peran akademisi dan praktisi pemerintah dalam membangun sistem evaluasi yang transparan, akuntabel, dan berbasis bukti.

Selain memberikan manfaat praktis, kegiatan ini juga memiliki nilai strategis dalam konteks penguatan kapasitas kelembagaan daerah di era desentralisasi. Terbentuknya rancangan awal mekanisme monev RPKD menjadi dasar pengembangan sistem evaluasi yang lebih terstruktur, adaptif, dan berorientasi hasil. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi model pembelajaran berkelanjutan bagi pemerintah daerah lainnya dalam memperkuat sistem tata kelola penanggulangan kemiskinan berbasis data. Keberhasilan pelatihan ini juga memperlihatkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan partisipasi aktif aparatur dalam menciptakan lingkungan birokrasi yang belajar (*learning organization*), responsif terhadap perubahan, dan inovatif dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan daerah.

Ke depan, hasil kegiatan ini berpotensi dikembangkan melalui pendampingan teknis lanjutan dalam penyusunan sistem informasi kemiskinan daerah yang terintegrasi, serta pembentukan forum koordinasi lintas perangkat daerah untuk memastikan keberlanjutan praktik monev. Prospek pengembangan ini tidak hanya mendukung efektivitas program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Seram Bagian Barat, tetapi juga dapat direplikasi di daerah lain sebagai model penguatan kapasitas kelembagaan berbasis bukti. Secara konseptual, kegiatan ini menjadi bukti bahwa kolaborasi antara akademisi dan pemerintah daerah mampu menghasilkan inovasi dalam tata kelola kebijakan publik yang berorientasi pada hasil dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*).

DAFTAR PUSTAKA

- Aldehaim, U., Aldhuhoori, H., Hasabelnabi, A., & Alsereidi, S. (2024). The impact of effective training programs on organizational performance in the public sector. *International Journal of Management and Technology*, 13(2), 45–57. <https://doi.org/10.58898/ijmt.v3i2.47-57>
- Anam, C., Plaček, M., & Valentínov, V. (2023). Village funds and poverty reduction in Indonesia: New policy insight. *Discover Global Society*, 1, 14. <https://doi.org/10.1007/s44282-023-00016-6>
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2022). *Pedoman umum penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD)*. https://sepakat-demo.bappenas.go.id/wiki/PANDUAN_PENANGGULANGAN_KEMISKINAN_EKSTREM_BAB_III_KEBIJAKAN_SAAT_INI
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Seram Bagian Barat. (2024). *Kabupaten Seram Bagian Barat dalam angka 2024*. BPS Kabupaten SBB. <https://sbbkab.bps.go.id/publication/2024/02/28/06a25514da3b9eea5a442e12/kabupaten-en-seram-bagian-barat-dalam-angka-2024.html>
- Fajria, R., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Naldi, H. (2025). Evaluasi implementasi desentralisasi di Indonesia: Keberhasilan dan kegagalan. *PUBLICNESS: Journal of Public Administration Studies*, 4(2), 142–149. <https://doi.org/10.24036/publicness.v4i2.259>

- Hapsari, N., Wirjatmi, T. L., & Gedeona, H. T. (2023). Optimalisasi kegiatan monitoring dan evaluasi di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Media Administrasi Terapan*, 4(1), 19–25. <https://jmat.stialanbandung.ac.id/index.php/jmat/article/view/90>
- Kesavan, P. (2021). *Enablers of Organisational Learning, Knowledge Management, and Innovation: Principles, Process, and Practice of Qualitative Data*. Springer Singapore. <https://doi.org/10.1007/978-981-15-9793-0>
- Landiyanto, E. A. (2015). *Transformation of the national monitoring and evaluation arrangement in decentralized Indonesia* [Working paper]. Munich Personal RePEc Archive. <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/69073/>
- Ojok, J., & Basheka, B. C. (2016). Measuring the effective role of public sector monitoring and evaluation in promoting good governance in Uganda: Implications from the Ministry of Local Government. *Africa's Public Service Delivery & Performance Review*, 4(3), Article a122. <https://doi.org/10.4102/apsdpr.v4i3.122>
- Ortenblad, A. R. (Ed.). (2019). *The Oxford Handbook of the Learning Organization*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198832355.001.0001>
- Prasetyo, B. E., Sinurat, M., & Tahir, B. (2024). Kinerja Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dalam pengelolaan Sistem Informasi Monitoring Data Internal (e-SIMDATIN) di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 10(2), 1–12. [https://doi.org/10.25299/jkp.2024.vol10\(1\).17582](https://doi.org/10.25299/jkp.2024.vol10(1).17582)
- Piening, E. P., & Salge, T. O. (2015). Understanding the antecedents, contingencies, and performance implications of process innovation: A dynamic capabilities perspective. *Journal of Product Innovation Management*, 32(5), 733–751. <https://doi.org/10.1111/jpim.12225>
- Qisthi, M. R., & Pandoyo, P. (2024). Analisis kinerja monitoring dan evaluasi di Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Studi di Bappelitbangda Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Reformasi Administrasi : Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 11(2), 131–140. <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/reformasi/article/view/4181>
- Setiawan, A., Tjiptoherijanto, P., Mahi, B. R., & Khoirunurrofik, K. (2022). The impact of local government capacity on public service delivery: Lessons learned from decentralized Indonesia. *Economies*, 10(12), 323. <https://doi.org/10.3390/economies10120323>
- Sugiyarto, A., Lee, B. L., & Wilson, C. (2025). Narrowing the gap: Dynamics of Indonesia's public expenditure performance in economically lagging districts. *Economic Analysis and Policy*, 85, 2299–2318. <https://doi.org/10.1016/j.eap.2025.03.014>
- Suryahadi, A., Al Izzati, R., & Suryadarma, D. (2020). Estimating the impact of COVID-19 on poverty in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 56(2), 175–192. <https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1779390>
- Surtiari, G. A. K., Wannewitz, M., Prasetyoputra, P., Hadumaon Siagian, T., & Garschagen, M. (2024). Indonesia's social protection system: The relevance of informal social protection to strengthen adaptation to climate change. *Journal of Integrative Environmental Sciences*, 21(1), Article 2375995. <https://doi.org/10.1080/1943815X.2024.2375995>
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. (2022). *Panduan Monitoring dan Evaluasi (Monev) RPKD*. <https://id.scribd.com/document/511266480/Paparan-TNP2K-Penyusunan-RPKD-RAT-dan-LP2KD>

World Bank. (2020). *No One Left Behind: Rural Poverty in Indonesia*. World Bank.
<https://documents1.worldbank.org/curated/en/289991593339788378/pdf/No-One-Left-Behind-Rural-Poverty-in-Indonesia.pdf>